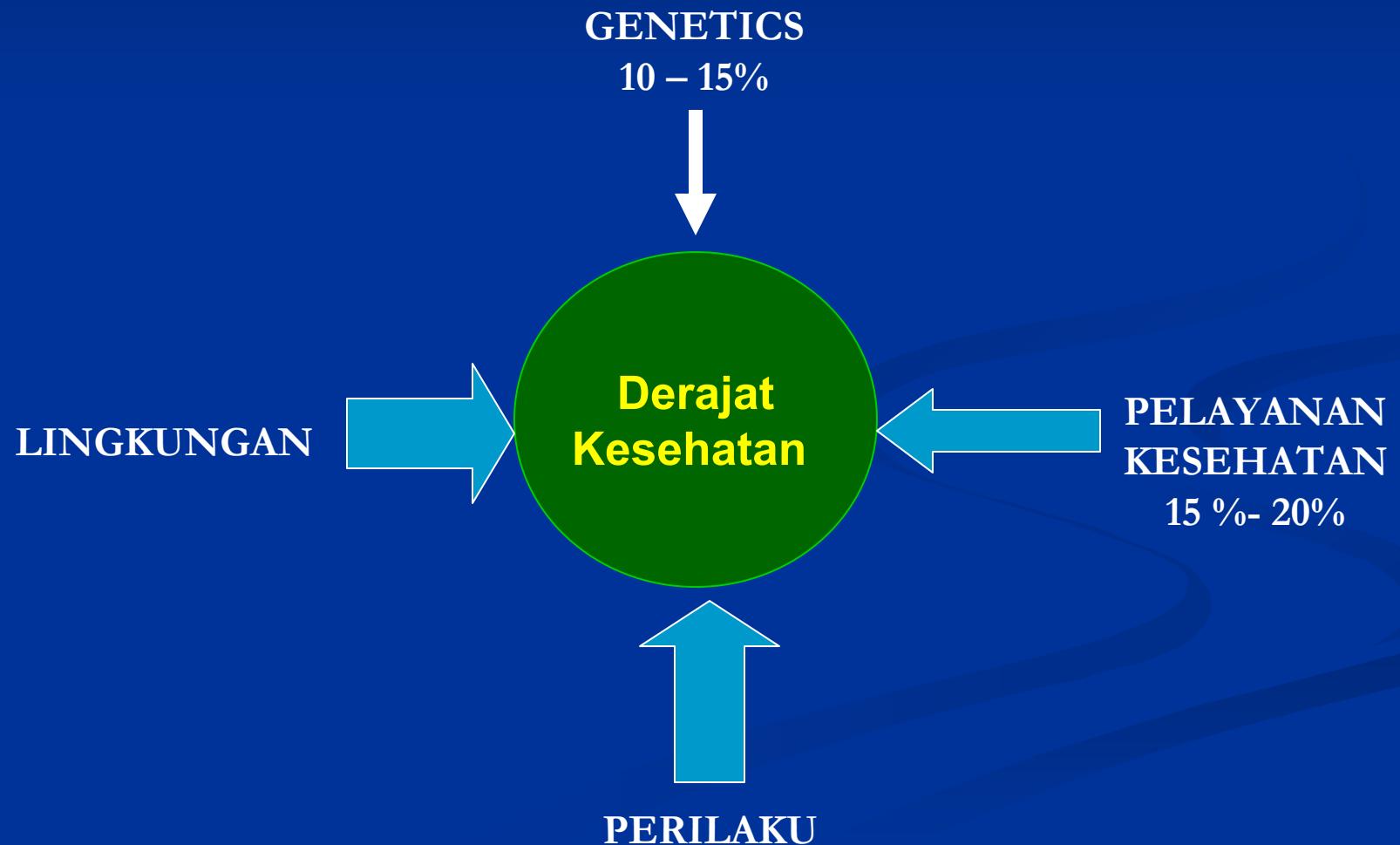




PEMBAHASAN PENGAWASAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

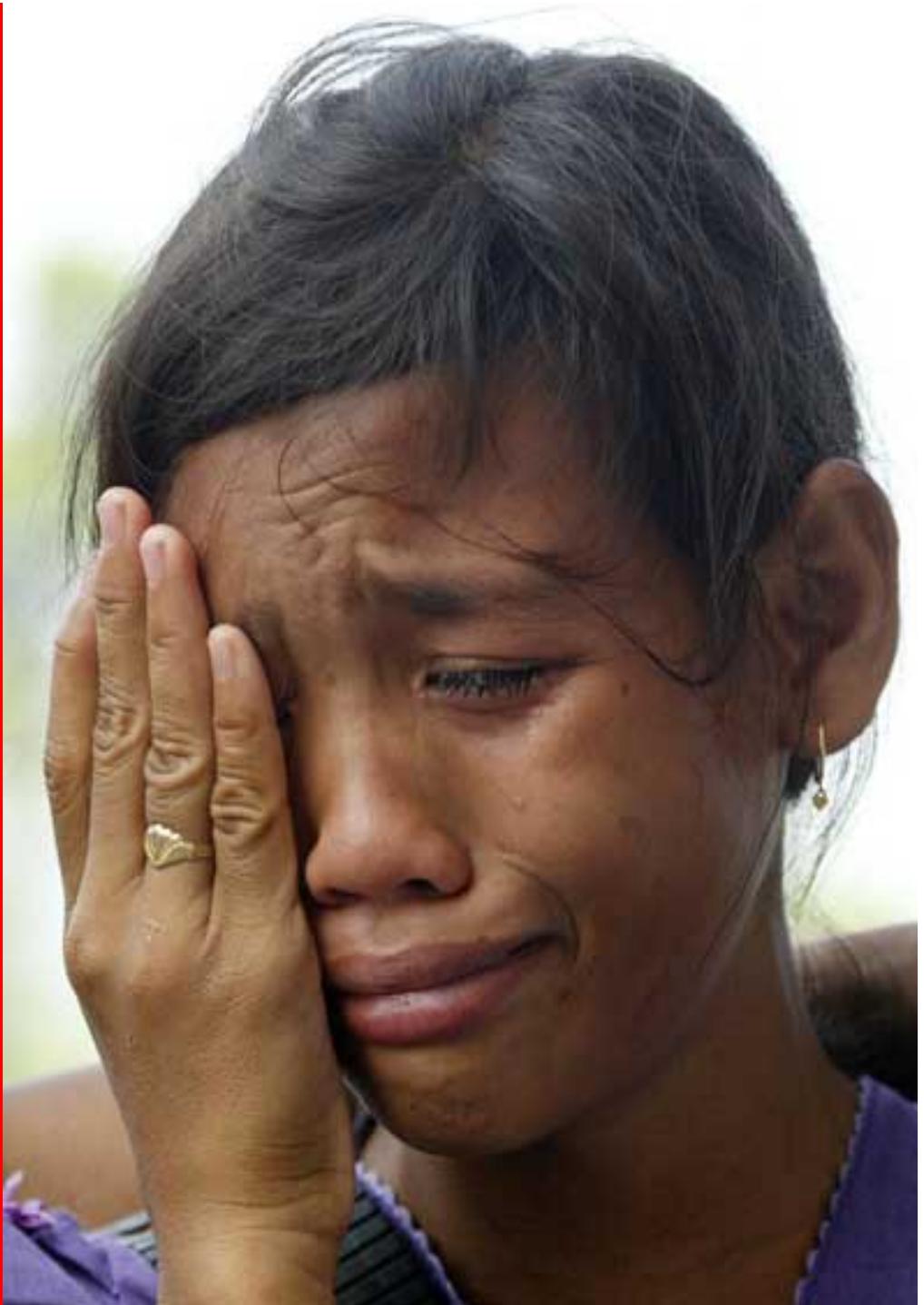
- 1. POSISI PENINGKATAN MUTU YANKES dalam berbagai Upaya Pembangunan Kesehatan**
- 2. SITUASI SAATINI**
- 3. PEMBAHASAN**
- 4. PENUTUP**

I. POSISI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN dalam berbagai Upaya Pembangunan Kesehatan

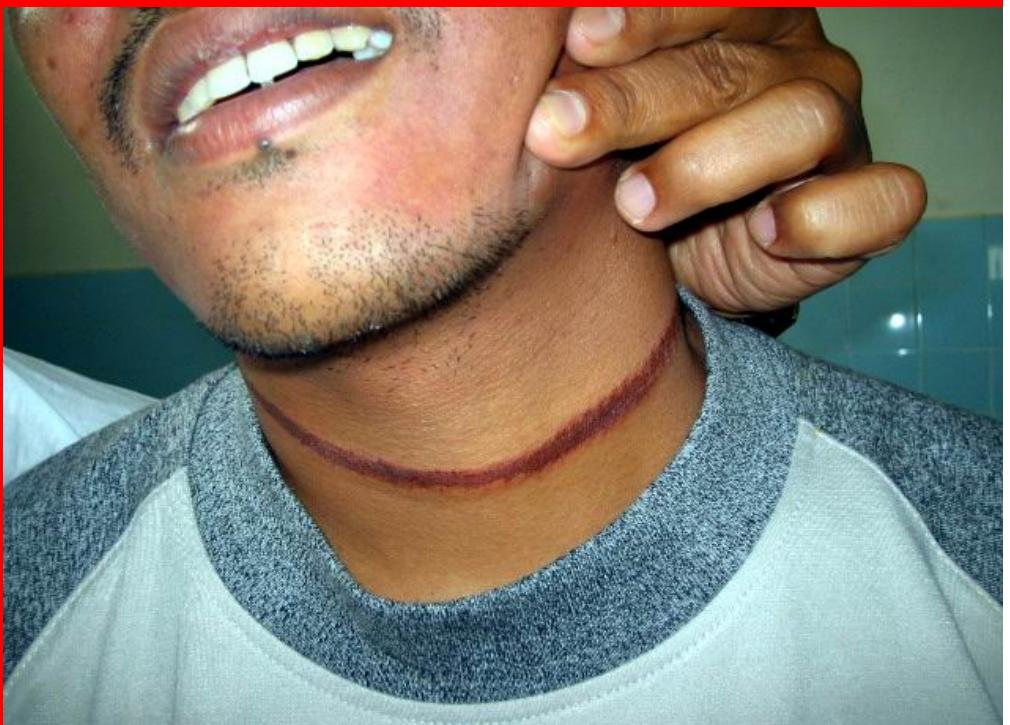


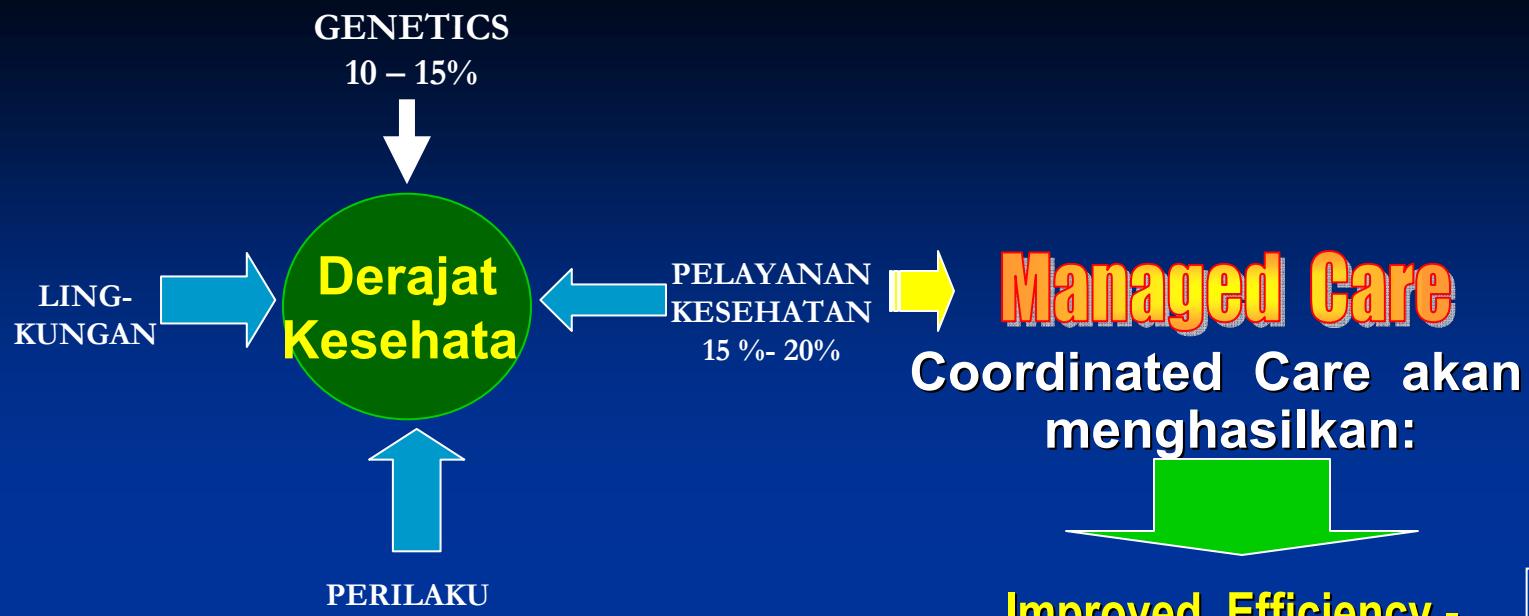




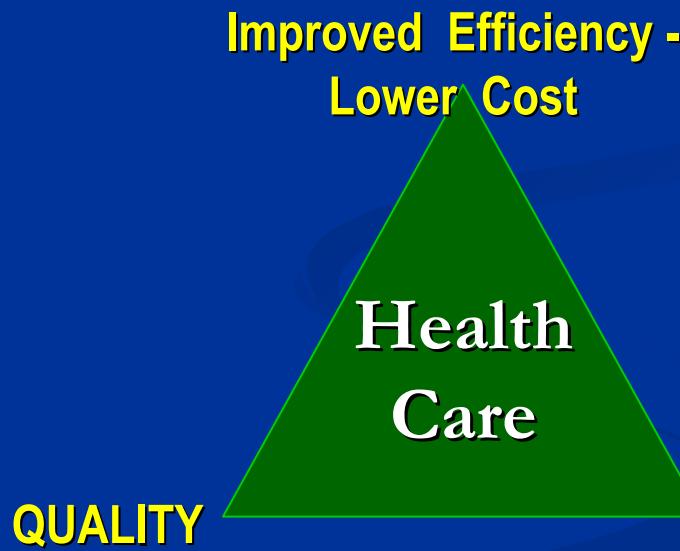








- Clinical
- Patient (Member) satisfaction



II. SITUASI SAATINI

A. PENETAPAN DAN PENEGAKAN STANDARD

1. STANDARD PELAYANAN NON-MEDIS (dibawah kendali PT. ASKES):

- Pemberian Surat Jaminan di loket PPAT/RS
- Kecepatan penyelesaian kartu Askes (pendaftaran, penerbitan, distribusi)
- Kecepatan pembayaran klaim provider Kesehatan (Puskesmas, Dokel, RS, Apotek, Optikal dsb)
- Kecepatan penanganan keluhan

2. STANDARD PELAYANAN MEDIS (kendali bersama antara Provider Kesehatan dengan PT. ASKES):

- **Sistem Rujukan Berjenjang**
- **RI di Kelas III untuk Maskin**
- **Obat DPHO**
- **Pelayanan yang ditanggung dan tidak ditanggung (untuk Maskin semua ditanggung)**
- **Standard alat penunjang medis (IOL, Pen Screw, Hemodialisa dg. Reuse 4x, dsb)**

B. PEMBIAYAAN KESEHATAN

1. SUMBER DANA

- Untuk PNS/PP: pemotongan gaji pokok + tunjangan keluarga, ditambah iuran pemerintah (PP 28)
- Untuk Maskin atau PBI: dari kompensasi BBM/APBN-P

2. CARA PEMBAYARAN

- RJTP: Kapitasi
- RJTL dan RI di RS:
 - Pola Tarif Paket dan Luar Paket
 - Budgeting System (?)
 - DRG (?)

TARIP:

- Besaran Tarip Paket/Luar Paket ditentukan bersama (Tarip Negosiasi): tarip maksimal berdasar SKB MENKES-MENDAGRI untuk PNS/PP dan SK. MENKES 56 untuk Maskin.
- Tarip Negosiasi dituangkan dalam PKS antara Direktur RS dg PT. Askes setempat, dengan prinsip penghitungan PPE (Unit Cost Instalasi RS dikurangi Obat yg diresepkan)
- Untuk PNS/PP: bisa kena Iur-Biaya
- Untuk Maskin : tidak boleh Iur-Biaya (masalah: siapa yang nomboki??)

C. KONTROL PEMERINTAH DAN MASYARAKAT:

OBYEK	LEMBAGA KONTROL
BAPEL (PT. Askes)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kem. Neg. BUMN ■ Dep. Keu ■ Depkes ■ BPK ■ BPKP ■ SPI <ul style="list-style-type: none"> ■ ISO ■ Forum Konsultasi ■ Forum Komunikasi ■ LSM ■ Pemda / Kec. / Desa ■ Konsumen
PROVIDER KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Depkes ■ Cinkes Prop/Kab ■ BPK ■ BPKP ■ BAWASDA ■ ISO ■ Forum Konsultasi ■ Forum Komunikasi ■ LSM ■ Konsumen <ul style="list-style-type: none"> ■ LAIN2 (Kendali PT. Askes thd PPK) <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Surat Jaminan - Verifikasi Klaim - Penerapan SIM On-line - Utilization Review - PKS
PASIEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ SIM OBAT di Apotik ■ PPAT/RS ■ Surat Jaminan

III. PEMBAHASAN

- 1. ISU UNTUK PEMERINTAH**
- 2. ISU UNTUK PROVIDER**
- 3. ISU UNTUK PT. ASKES**
- 4. ISU UNTUK MASYARAKAT**

ISU UNTUK PEMERINTAH

1. Kendala Reformasi Kesehatan al:

- Legal and Political consideration
- Historical institutions
- Kemampuan peningkatan fungsi
“STEWARDSHIP” → termasuk Regulasi dan
Menjamin Mutu
- Kemampuan Pembiayaan
- Perilaku sosial dan kultur

2. Equality vs. Equity dalam pembiayaan kesehatan

3. Mengendalikan Inflasi Kesehatan

ISU UNTUK PROVIDER

- 1. Dilemma Ethic, hubungan dokter-pasien**
- 2. Dampak terhadap Praktek Kedokteran:**
 - “The right service to the right member at the right place and time”
 - Akuntabilitas terhadap Outcome.
- 3. Dilemma Finansial Yankes Maskin :**
 - “....antara tugas dan cinta?”
 - “mesin penghasil uang vs. memanage penduduk agar tetap sehat.
- 4. Quality Management dan Utilization Management**

ISU UNTUK PT. ASKES

- 1. “Member” rather than “Patient”**
- 2. Need Assessment kebutuhan Member**
- 3. Bagaimana mengukur hasil / outcome:**
 - Survai Kepuasan Pelanggan (terhadap service maupun persepsi)**
 - Utilization dan Quality**
- 4. Kontrak / PKS dengan bahasa yang jelas**

ISU UNTUK MASYARAKAT

- 1. Moral Hazard**
- 2. Lower hospitalization dan referral cost: member perlu mendapat cukup informasi**

IV. PENUTUP

MARILAH KITA BEKERJA DALAM SISTEM YANG UTUH

